



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 27/KPTS/ITDAPROV/2025  
TENTANG

TIM PENGELOLA PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN  
DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERINTEGRASI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  - c. bahwa dalam rangka mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
  - d. bahwa dalam rangka tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 347 Tahun 2020 dan Nomor 061/PKS-INSPEKTORAT/I/2020 tanggal 04 November 2020;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;